GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 13 Desember 2007**

Subyek : Penurunan emisi karbon **Hari : Kamis**

Halaman : 13

Penurunan Karbon Tetap Berjalan

Disusun Skenario jika Tidak Tercapai Kesepakatan

Jimbaran, Kompas - Komitmen penurunan emisi karbon akan tetap berlanjut kendati skenario terburuk pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC terjadi, yakni tak tercapainya kesepakatan apa pun. Negara-negara di dunia akan tetap melaksanakan program penurunan karbon.

"Mereka sudah mengenal kebijakan nasional yang langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan perubahan iklim. Bahkan, Meksiko sudah berpikir membuat studi lebih lanjut," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jimbaran, Bali, Rabu (12/12).

UNFCCC yang digelar di Bali diharapkan merumuskan beberapa hal, salah satunya kesepakatan mengenai jual-beli kuota produksi gas karbon (carbon trading) yang membahayakan lingkungan. Konferensi ini diharapkan menjadi jaminan keberlanjutan Protokol Kyoto yang menjadi pegangan semua negara dalam pemeliharaan lingkungan, terutama menghadapi akibat perubahan iklim.

Menurut Sri Mulyani, kalaupun sudah ada target, misalnya penurunan emisi gas buang sebesar 30 persen atau 50 persen pada 2030 atau 2050, komitmen negara-negara di dunia tetap jalan. Target itu dipastikan menjadi unsur penekan agar semua negara mematuhi target emisi karbon.

"Pada akhirnya semua orang menyadari bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi berbisnis seperti biasa, tanpa memikirkan kelestarian lingkungan," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Kini setiap negara terfokus pada program pengembangan energi ramah lingkungan, baik dalam pembangunan pembangkit listrik, pencarian energi alternatif, maupun pembangunan sistem transportasi yang menggunakan energi terbarukan. Mereka memberikan berbagai insentif terhadap industri yang menerapkan teknologi dan energi bersih lingkungan.

Tawaran Jepang

Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ichiro Kamoshita mengatakan, para pihak dalam konferensi ini harus membentuk Ad Hoc Working Group (AWG) baru di bawah Konvensi Perubahan Iklim, dengan partisipasi negara- negara pencemar utama (termasuk Amerika Serikat).

Bersama-sama dengan AWG di bawah Protokol Kyoto, AWG yang baru di bawah konvensi itu mendiskusikan komitmen masa depan negara-negara Annex-1 terhadap Protokol. Artinya, AWG yang baru di bawah konvensi itu harus terdiri atas negosiasi "dua jalur" yang saling berkaitan.

"Kalau proses itu tidak terjadi, konferensi di Bali ini dapat dianggap gagal," ujar Kamoshita. Proses dialog skema masa depan yang diharapkan Komashita itu juga banyak disampaikan oleh juru bicara sejumlah negara.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Kamoshita mengatakan, selain empat building blocks, yakni mitigasi, adaptasi, teknologi, dan pendanaan, pihaknya mengusulkan elemen tambahan yang bertujuan global jangka panjang menyangkut efisiensi, keamanan energi, dan manfaat bersama yang memberi ruang pada persaingan internasional dan kehutanan.

Bantuan 33 juta dollar AS

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick menyaksikan penandatanganan Fasilitas Dukungan Multidonor (MSF) sebesar 33 juta dollar AS untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri di Nusa Dua, Bali, Rabu petang.

Penandatangan yang dilakukan Direktur Bank Dunia di Indonesia Joachim von Amsberg dan Deputi Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Lukita D Tuwo itu juga disaksikan oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.

Presiden juga menandatangani poster yang menandai peluncuran Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia tahun 2007.

PNPM Mandiri merupakan program nasional pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia. Prakarsa itu diumumkan pada September 2006 dan diresmikan April 2007 di Palu.

Pemberdayaan itu dilakukan dengan pendekatan partisipasi yang mendorong masyarakat memperbaiki kehidupannya sendiri. PNPM Mandiri menyediakan block grant yang dikelola masyarakat untuk kebutuhan yang ditentukan mereka sendiri, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan proyek-proyek ekonomi mikro. "Tujuan PNPM sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium," ujar Aburi- zal. (MH/NAW/AIK/OKI/OIN/INU)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP